

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Selama ini UMKM terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi kendala tersebut, di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan pemerintah atau masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro (LKM). Tetapi LKM tersebut banyak yang belum berbadan hukum dan memiliki izin usaha. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi LKM, pada tanggal 8 Januari 2013 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Sebagian besar umat Islam yang hati-hati dalam menjalankan perintah dan ajaran agamanya menolak menjalin hubungan bisnis dengan perbankan konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga, kendati mereka tahu bahwa lembaga ini berperan besar dalam perjalanan panjang pembangunan ekonomi bangsa. Dalam hal ini umat Islam hanya sedikit saja yang mau memanfaatkan fasilitas kredit berbunga dari bank konvensional, sebaliknya mereka lebih suka mencari jalan lain di luar lembaga perbankan untuk segala keperluan bisnisnya.<sup>1</sup>

Pembiayaan usaha kecil menengah (UKM) dan mikro merupakan produk dari KSPPS Arthamadina Banyuputih. Produk ini disesuaikan

---

<sup>1</sup> Karnaen Perwata Atmaja dan Muhamad Syafii Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Darma Bakti Wakaf, 1992, h. 25

dengan keadaan dan permintaan anggotanya yang sebagian besar pedagang. Pembiayaan ini lebih diarahkan untuk meningkatkan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah.<sup>2</sup>

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Arthamadina yang berdiri pada tanggal 4 Mei 2007 di kota Batang, merupakan sebuah lembaga keuangan yang berupaya untuk mengembangkan ekonomi, khususnya bagi masyarakat muslim menengah ke bawah dan membantu perekonomian masyarakat Batang khususnya. Sebagai lembaga intermediasi yang menjembatani antara pihak yang surplus dana dengan pihak yang defisit dana, KSPPS Arthamadina menggunakan prinsip syariah di dalam kegiatan funding dan kegiatan landing. Melalui KSPPS Arthamadina kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dana dan memberi manfaat kepada kedua belah pihak. Disamping itu membantu usaha kecil dan rumahan menyediakan dana untuk membantu usahanya.

Peran KSPPS dalam menumbuh kembangkan usaha mikro dilingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti dipembangunan nasional. Bank yang diharapkan mampu menjadi perantara keuangan ternyata hanya mampu bermain pada level menengah atas. Sementara lembaga keuangan non formal yang notabennya mampu menjangkau pengusaha mikro tidak mampu meningkatkan kapasitas usaha kecil usaha untuk mencapai tujuan pemberdayaan sistem ekonomi islam di Indonesia, salah satunya dengan mengembangkan usaha sektor riil. Kegiatan sektor riil mencakup atas berbagai kegiatan sektor kecil dan menengah. Sektor riil sejenis pertanian, industri, perdagangan dan jasa merupakan pilar penyangga ketahanan sistem perekonomian nasional. Secara mikro, kegiatan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan bentuk

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Manager, Budi Waluyo, 17 Februari 2016, pukul 10.15 WIB

kegiatan usaha yang dianggap paling produktif dan dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi nasional.<sup>3</sup>

Kegiatan pembiayaan usaha mikro juga banyak dilakukan oleh KSPPS Arthamadina Banyuputih yang dominan nasabahnya berprofesi sebagai pedagang . dalam memberikan pembiayaan, KSPPS Arthamadina Banyuputih melihat peluang usaha yang dikelola serta kelayakan calon anggota untuk diberikan pembiayaan. dalam menilai anggota yang akan dibiayai, KSPPS Arthamadina Banyuputih menilai anggotanya dari usaha produktif yang dikelolanya.

KSPPS Arthamadina Banyuputih juga melakukan pengawasan kepada anggotanya untuk menghindari penyalahgunaan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan pribadi. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara menjalin silaturahmi dengan anggotanya, dan menanyakan bagaimana perkembangan anggota.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dilapangan, KSPPS Arthamadina dalam melakukan penyaluran pembiayaan dengan baik dan tepat, namun dalam pengembalian pembiayaannya terdapat nasabah yang tidak tepat waktu, maka dari itu penlis tertarik melakukan penelitian tugas akhir ini dengan judul “ MEKANISME PENGAWASAN PENYALURAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI KSPPS ARTHAMADINA BANYUPUTIH ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam tugas akhir ini adalah

1. Bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan usaha mikro di KSPPS Arthamadina Banyuputih ?
2. Bagaimana pengawasan pembiayaan usaha mikro di KSPPS Arthamadina Banyuputih ?

---

<sup>3</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam (Instrumen lembaga Keuangan Syari'ah)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, cet ke-1, 2004, h. 31

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang hendak di capai pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui mekanisme pencairan pembiayaan usaha mikro di KSPPS Arthamadina Banyuputih.
2. Mengetahui pengawasan pembiayaan usaha mikro di KSPPS Arthamadina Banyuputih.

### D. Tinjauan Pustaka

Selama ini pembahasan tentang pembiayaan sebuah produk pada perusahaan jasa keuangan telah banyak dibahas dalam berbagai karya baik berupa makalah, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau buku-buku baik sebagai judul khusus maupun sebagai sub judul. Dan untuk mendukung permasalahan yang lebih relevan dan mendalam terhadap bahasan diatas, penyusun berusaha malacak berbagai literature dan pnelitian terdahulu (prior research) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini. Berikut tugas akhir yang disusun oleh Nur Aini Zulfa dengan judul “PRAKTEK PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT AN-NAWAWI PURWOREJO” menyimpulkan Akad mudharabah yang diterapkan oleh BMT An-nawawi Purworejo dapat dikatakan bagus dikarenakan Akad yang diterapkan benar-benar terealisasi yaitu dibidang pembiayaan, ini diterapkan saat berlangsungnya nasabah ingin mengadakan transaksi dengan pihak BMT An-nawawi Purworejo yaitu dengan cara 5 C studi kelayakan usaha.<sup>4</sup> Penelitian lain yang dilakukan oleh saudari Lia Anisatul Muniroh yang ditulis dalam sebuah tugas akhir yang berjudul “PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS BMT BAHTERA PEKALONGAN” menyimpulkan bahwa dalam hal ini sistem pembayaran tersebut dilakukan secara angsuran ataupun secara langsung/jatuh tempo (murabahah angsuran dan murabahah jatuh tempo). Jumlah kewajiban

---

<sup>4</sup>Nur Aini Zulfa, *Praktek Pembiayaan Mudharabah pada BMT An-Nawawi Purworejo*, TA UIN Walisongo Semarang th. 2015

yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada BMT Bahtera ialah jumlah harga barang dan mark-up (keuntungan yang telah disepakati ) dan adapun Kendala yang dihadapi pada KJKS BMT Bahtera adalah pembayarannya yang tidak stabil atau tidak sesuai, karena pembiayaan murabahah dari tahun ke tahun meningkat, maka dari itu terjadi kurangnya pengontrolan.<sup>5</sup> Pada sebuah Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU ABNYUMANIK” disusun oleh Budi Utomo menyimpulkan, bahwa Prosedur pembiayaan mudharabah di BSM KCP Banyumanik di mulai dari permohonan pembiayaan nasabah dengan cara mengisi formulir atau aplikasi beserta menyertakan persyaratan awal. Pengisian aplikasi tersebut didampingi dan dianalisa oleh AO. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh AO akan dilakukan komite yang mana tahap ini berfungsi untuk memutuskan apakah pembiayaan akan di ACC atau tidak. Jika pembiayaan di setuju maka pegawai administrasi pembiayaan membuat SP3 (Surat Penegasan Pemberian Pembiayaan), dan melakukan akad pembiayaan oleh notaris. Berdasarkan SP3 dan akad tersebut menjadi dasar operating Manager untuk melakukan pencairan pembiayaan kepada nasabah. Setelah proses pencairan, AO melakukan monitoring terhadap nasabah. Monitoring tersebut berupa pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah dalam melakukan angsuran hingga pelunasan.<sup>6</sup>

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini bukanlah yang pertama yang dilakukan, namun dengan memposisikan penelitian-penelitian diatas sebagai sebuah referensi, memberikan peluang bagi peneliti untuk meneliti tema yang sama namun dengan mengambil fokus

---

<sup>5</sup>Lia Anisatul Muniroh, *Pembiayaan Murabahah diKJKS BMT Bahtera Pekalongan*, TA IAIN Walisongo Semarang th. 2012

<sup>6</sup> Budi utomo, *Analisis Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Pembantu Banyumanik*, TA STAIN Salatiga, th. 2014

bahasan yang berbeda yaitu Mekanisme Pembiayaan Usaha Mikro dan pengawasannya di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan informasi yang tepat dan jelas mengenai mekanisme pembiayaan usaha mikro dan pengawasannya di KSPPS Arthamadina Banyuputih.
2. Dapat memberikan suatu kegunaan yang praktis bagi upaya pemecahan masalah yang diuraikan di atas

#### **F. Metodologi Peneliti**

Pada penelitian ini, terdapat tiga langkah dasar yang harus dijalankan terkait metode penelitian yaitu sebagai berikut :

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang diadakan di KSPPS Arthamadina Banyuputih untuk memperoleh data-data yang di butuhkan.

##### 2. Sumber Data

a. Data primer merupakan data yang relevan dengan pemecahan masalah, data yang diambil dari sumber utama atau dikumpulkan langsung oleh peneliti sendiri, seperti wawancara dengan manajer untuk mengetahui bagian mana proses dan pengawasan pembiayaan usaha kecil secara optimal di KSPPS Arthamadina Banyuputih.<sup>7</sup>

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Dalam hal ini penulis mengambil dari literatur-literatur yang ada di buku-buku yang ada hubungannya dengan topik yang di teliti.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, cet ke-16,2006,h.129.

<sup>8</sup> Anwar Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 91.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Interview (wawancara)

Interview atau wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang di wawancarai.<sup>9</sup> Dalam penyusunan tugas akhir ini, wawancara dilakukan dengan karyawan KSPPS Arthamadina Banyuputih.

#### b. Observasi

Observasi merupakan metode yang bukan hanya sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian kedalam suatu skala bertingkat.<sup>10</sup> Penulis mengadakan pengamatan langsung pada objek yang diteliti yaitu dengan melihat langsung kegiatan pengawasan pembiayaan.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah dan sebagainya. Data yang diperoleh diantaranya formulir pembiayaan, formulir pengajuan pembiayaan, lembar survei calon pasangan usaha, dan hasil survei.

### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi. Penelitian melakukan analisis dan dengan memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.

Setelah tahap pengumpulan data, kemudian data diolah dan dianalisis sesuai dengan teori-teori prosedur dan pengawasan pembiayaan di KSPPS Arthamadina Banyuputih.

---

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet ke-26, 2009, h. 186.

<sup>10</sup> Arikunto, *Prosedur...*

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, untuk meningkatkan pemahaman tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>11</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan tugas akhir ini akan dibagi menjadi empat bab, yaitu :

- BAB I** : 1) Latar belakang  
2) Perumusan masalah  
3) Tujuan dan manfaat hasil penelitian  
4) Tinjauan pustaka  
5) Metodologi penelitian  
6) Sistematika penulisan
- BAB II** : Landasan teori menjelaskan tentang penyaluran pembiayaan, mudharanah dan pengawasannya.
- BAB III** : Gambaran umum KSPPS Athamadina Banyuputih yang mencakup sejarah berdirinya, landasan hukum pendirian, visi misi dan motto, struktur organisasi, job deskription, dan produk pelayanan di KSPPS Arthamadina.
- BAB IV** : Mekanisme penyaluran pembiayaan usaha mikro dan pengawasannya di KSPPS Arthamadina Banyuputih , menjelaskan tentang prosedur pencairan dan pengawasannya kepada anggota selama pembiayaan berjalan serta kendala-kendala dalam melakukan pengawasan.

---

<sup>11</sup> Margiono S., *Metedeologi Penelitian*, Jakarta: Rineke Cipta, 1996, h. 30.

**BAB V :** Berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penyusun ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penyusun pada khususnya dan pihka-pihak lain pada umumnya, serta penutup.